



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA BATAS KELURAHAN JELAPAT DAN KELURAHAN HILIR SPER
KECAMATAN DUSUN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa;
 - b. bahwa penetapan batas Kelurahan Jelapat dengan Kelurahan Hilir Sper telah disepakati oleh Pemerintah Kelurahan Hilir Sper dengan Pemerintah Kelurahan Jelapat berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Nomor : 400/562/KL-H.SPERSPER/Pem/V/2018 dan Nomor : 42/PEM/KL-JLP/XII/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan tanggal 16 Juli 2021;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Hilir Sper dan Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN JELAPAT DAN KELURAHAN HILIR SPER KECAMATAN DUSUN SELATAN.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
4. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Batas Kelurahan Hilir Sper meliputi :

- a. Batas Utara : Kelurahan Buntok Kota
- b. Batas Barat : Kelurahan Jelapat
- c. Batas Timur : Desa Danau Ganting
- d. Batas Selatan : Kelurahan Jelapat

Batas Kelurahan Jelapat meliputi :

- a. Batas Utara : Kelurahan Hilir Sper
- b. Batas Barat : Desa Muara Ripung
- c. Batas Timur : Desa Danau Ganting
- d. Batas Selatan : Desa Danau Sadar

Pasal 3

Batas Kelurahan Jelapat dengan Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan dimulai dari :

- a. Pertigaan batas Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Jelapat dan Desa Muara Ripung pada Tepi Danau Palui yang ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 05.77''$ LS dan $114^{\circ} 48' 57.83''$ BT;
- b. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti tepi Danau Palui sampai pada Ujung Jalan Buntok Seberang yang ditandai oleh TK-1 dengan koordinat $01^{\circ} 43' 24.11''$ LS dan $114^{\circ} 49' 08.19''$ BT;
- c. TK-1 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As Sungai Palui sampai pada Muara Irigasi Danau Palui yang ditandai oleh PABU-2 dengan koordinat $01^{\circ} 44' 08.07''$ LS dan $114^{\circ} 48' 58.63''$ BT;
- d. PABU-2 selanjutnya mengarah ke Timur sampai pada Buntok Seberang yang ditandai oleh TK-2 dengan koordinat $01^{\circ} 44' 10.90''$ LS dan $114^{\circ} 49' 23.89''$ BT;
- e. TK-2 selanjutnya mengarah ke Timur menyeberangi Sungai Barito sampai pada Muara Sungai Masangkin di Pinggir Sungai Barito yang ditandai oleh PABU-3 dengan koordinat $01^{\circ} 44' 13.03''$ LS dan $114^{\circ} 49' 41.35''$ BT;
- f. PABU-3 selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti As Sungai Masangkin sampai pada Jembatan Jalan Jelapat yang ditandai oleh PABU-4 dengan koordinat $01^{\circ} 44' 05.79''$ LS dan $114^{\circ} 49' 51.48''$ BT;
- g. PABU-4 selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti As Sungai Masangkin sampai pada Jembatan Jalan Kartini yang ditandai oleh PABU-5 dengan koordinat $01^{\circ} 43' 59.71''$ LS dan $114^{\circ} 49' 57.51''$ BT;
- h. PABU-5 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti As Sungai Masangkin sampai pada Sungai Masangkin yang ditandai oleh TK-3 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 20.66''$ LS dan $114^{\circ} 50' 22.00''$ BT; dan
- i. TK-3 selanjutnya mengarah ke Selatan sampai pada Sungai Masangkin yang ditandai oleh PABU-6 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 34.98''$ LS dan $114^{\circ} 50' 19.23''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Jelapat, Kelurahan Hilir Sper dan Desa Danau Ganting Kecamatan Dusun Selatan.

Pasal 4

PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama Desa, penggabungan dan atau pemekaran Desa, perubahan status Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada

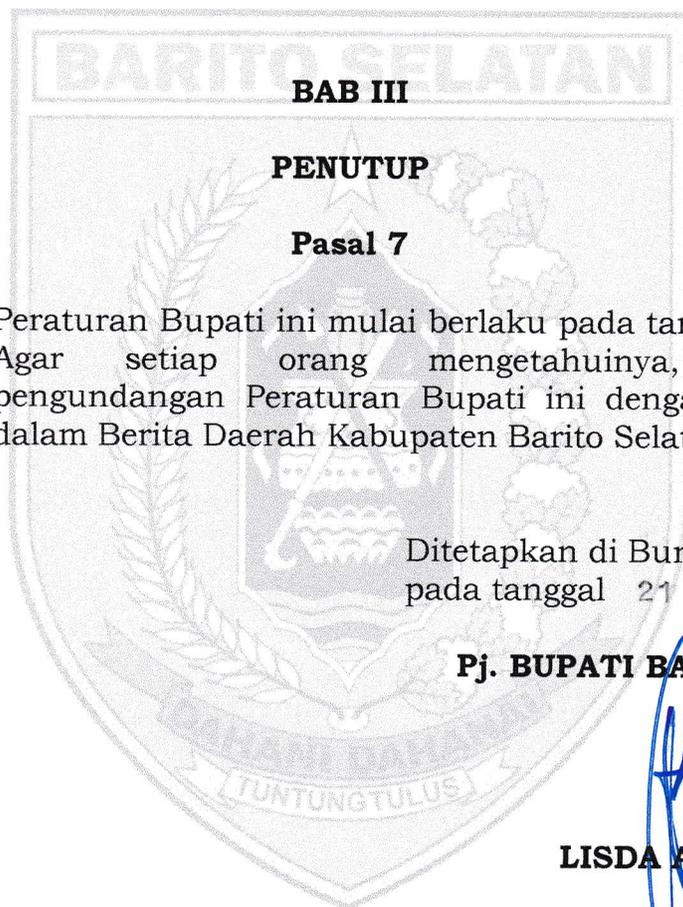
masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Desa dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimuat dalam Peta Batas Kelurahan Jelapat dengan Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 September 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 21 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022
NOMOR : 29**

